

BAB IV

GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN

4. 1. Sejarah singkat Maluku Utara (Ternate)

Maluku Utara merupakan provinsi termuda dari 33 provinsi resmi terbentuk tanggal 4 Oktober 1999 yang sebelumnya merupakan sebuah Kabupaten. Pada awalnya beribukota di Ternate yang berlokasi di kaki Gunung Gamalama sampai dengan 4 Agustus 2010, setelah 11 tahun masa transisi, ibukota Provinsi Maluku Utara dipindahkan ke Kota Sofifi terletak di Pulau Halmahera yang merupakan pulau terbesarnya.

Terkenal dengan sebutan Moloku Kie Raha atau Kesultanan Empat Gunung di Maluku Utara yang mulanya merupakan wilayah kerajaan Islam Timur Nusantara terbesar, terdiri dari kesultanan Bacan; Jailolo; Tidore; dan Ternate. Terdapat beragam suku yang mendiami wilayah Maluku Utara, yaitu Suku Madole, Pagu, Ternate, Makian Barat, Kao, Tidore, Buli, Suku, Suku Maba, Sawai, Weda, Gane, Makian Timur, Kayoa, Bacan, Sula, Ange, Siboyo, Kadai, Galela, Tobelo, Loloda, Tobaru, Sahu, Arab, dan Eropa.

Pergerakan perekonomian di Maluku Utara sebagian besar bersumber dari perekonomian rakyat yang bertumpu pada sektor pertanian, perikanan dan jenis hasil laut lainnya. Komoditas utama yang mendukung nadi perekonomian di Maluku Utara meliputi:

1. Kopra
2. Buah Pala
3. Cengkeh
4. Perikanan, yang sebagian telah diekspor ke Jepang
5. Emas

6. Nikel, yang sebagian telah diekspor ke Jepang

a) Letak wilayah Geografis

Maluku Utara terletak pada Koordinat $3^{\circ} 40' \text{ LS}$ - $3^{\circ} 0' \text{ LU}$ $123^{\circ} 50' - 129^{\circ} 50' \text{ BT}$, yang sebenarnya merupakan gugusan kepulauan dengan rasio daratan dan perairan 24 : 76. Memiliki gugusan pulau 395 buah, 83% atau sekitar 331 pulau belum berpenghuni.

b) Topografi

Provinsi Maluku Utara terletak pada 3o Lintang Utara 3o Lintang Selatan dan 124o 129o Bujur Timur. Berbatasan dengan Laut Halmahera di sebelah timur, Laut Maluku di sebelah barat, dan Laut Seram di sebelah utara. Terdiri dari 331 buah pulau besar kecil, 64 pulau yang berpenghuni. Secara administrasi Provinsi Maluku Utara terdiri dari 6 kabupaten dan 2 kota dengan Sofifi sebagai ibukota provinsi. Secara fisik memiliki daratan seluas 33.278 Km².

Dipengaruhi oleh iklim laut tropis dan musim. Oleh karenanya sangat dipengaruhi oleh lautan dan bervariasi antara tiap wilayah yaitu iklim Halmahera Utara, Tengah/Barat, Bacan dan Kepulauan Sula, dengan curah hujan rata-rata 2000-3000 mm. Topografi Provinsi Maluku Utara sebagian besar bergunung dan berbukit yang terdiri dari pulau-pulau vulkanis dan pulau karang, sebagian lainnya merupakan daratan. Pulau Halmahera mempunyai pegunungan rapat dengan daratan luas. Pulau-pulau relatif sedang umumnya memiliki daratan luas diselingi pegunungan yang bervariasi. Luas seluruh kawasan hutan adalah 2.861.475 ha.

Kondisi geografis sangat memungkinkan untuk pengembangan investasi perikanan karena memiliki potensi sebesar 478.382,50 ton/tahun yang terdiri dari ikan

pelagis besar. Potensi lestari yang masih dimanfaatkan sebesar 239.191,25 ton/tahun. Potensi komoditas unggulan dan kelautan meliputi cakalang/tuna, ikan kerapu, mutiara, cumi-cumi, rumput laut dan sebagainya. Sedangkan potensi komoditas antara lain ikan selar, layang, teri, demersal dan teripang. Peluang investasi lain adalah usaha pengalengan ikan di Pulau Halmahera, budidaya mutiara di Pulau Bacan, penangkapan ikan, dan pembesaran kerapu di Pulau Kayoa dan Kepulauan Sula.

4. 2. Ombudsman Maluku Utara

Ombudsman merupakan lembaga Negara yang memiliki tugas untuk mengawasi pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah dan negara (Ombudsman RI). Terdapat beberapa bentuk pengaduan masyarakat berkaitan dengan pelayanan dasar berupa pendidikan, kesehatan, administrasi kependudukan yang menjadi perihal permasalahan pengaduan pokok di Maluku Utara.

Ombudsman RI perwakilan Maluku Utara dalam pantauan ujian nasional menemukan pungutan liar selama Ujian Nasional, khususnya di Kabupaten Halmahera Selatan. Selain itu juga aduan masyarakat terkait dugaan maladministrasi dalam proses pembuatan SIM dari beberapa Satuan Pelayanan Administrasi di beberapa Polres di Maluku Utara, pelayanan di Badan Pertanahan Nasional atau BPN, dan yang lain tersebar dalam beberapa kelompok yang tidak begitu dominan.

